

MODEL PEMBELAJARAN NILAI-NILAI KARAKTER BANGSA DI INDONESIA DARI MASA KE MASA

Yudi Hartono *

Abstrak

Pembangunan karakter bangsa telah menjadi agenda penting sejak awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dari masa ke masa berpengaruh terhadap model pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di sekolah. Pada masa Orde Lama terutama era demokrasi terpimpin, cenderung menggunakan model indoktrinatif dengan materi Tubapi (tujuh bahan pokok indoktrinasi), yaitu Pancasila dan Manipol USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kebudayaan Indonesia). Pada masa Orde Baru juga cenderung indoktrinatif melalui Penataran P4, Mata Pelajaran PMP dan PSPB. Pada era reformasi pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di sekolah diintegrasikan ke dalam setiap masa pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan budaya sekolah. Pendidikan karakter semestinya dilaksanakan dalam rangka membentuk dan memperkuat karakter bangsa, sehingga perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara bertahap agar tidak menjadi sekadar pengetahuan atau indoktrinasi. Pendidikan karakter yang dikembangkan sudah seharusnya berakar dari budaya bangsa Indonesia yang menyepakati Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak-anak lewat pendidikan formal meliputi nilai-nilai yang khas Indonesia dan nilai-nilai universal.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Nilai-nilai Karakter Bangsa

Pendahuluan

Pembangunan karakter bangsa telah menjadi agenda penting sejak awal kemerdekaan Indonesia. Pembangunan karakter bangsa dicanangkan sebagai tujuan utama pendidikan saat itu. UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (UUPP) Pasal 3 menegaskan, Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air." Sementara Pasal 4 menegaskan, "Pendidikan dan

pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia".

Kegiatan pendidikan di tanah air pada awal-awal kemerdekaan diarahkan pada pemantapan nilai-nilai nasionalisme, identitas bangsa, dan pembangunan pondasi ideologis kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya menggelorakan semangat nasionalisme saat itu sangat tinggi, sehingga oleh Azyumardi Azra dipandang sebagai fase ke-2 tumbuhnya nasionalisme pada bangsa Indonesia (Maftuh, 2008:135).

* **Yudi Hartono** adalah Dosen Pendidikan Sejarah UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno membawa semangat *nation and character building* dalam pendidikan (Riant Nugroho, 2008:16). Pendidikan pada masa kolonial yang terlalu intelektualistis diganti dengan pendidikan yang dapat membentuk kepribadian, dapat mengembangkan kepercayaan diri, menimbulkan keberanian, inisiatif, dan semangat kerja (Djumhur&Danasuparta, 1975: 217).

Beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, Menteri pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara mengeluarkan Instruksi Umum yang isinya menyerukan supaya membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Di dalam Instruksi Umum dinyatakan bahwa pendidikan haruslah membangun semangat kebangsaan dan semangat patriotisme (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, 1954:10; Moestoko, 1986: 148).

Para guru mengganti sistem pengajaran kolonial dengan pengajaran untuk membangun semangat kebangsaan (Sjamsuddin dkk.,1993:13; Departemen Pendidikan Nasional, 1996: 75). Instruksi umum tersebut memerintahkan kepada semua kepala sekolah dan guru untuk: 1) Mengibarkan Sang Merah Putih setiap hari di halaman sekolah; 2) Melagukan lagu kebangsaan Indonesia Raya; 3) Menghentikan pengibaran bendera Jepang

dan menghapus nyanyian Kimiyago (lagu kebangsaan Jepang); 4) Menghapus pelajaran bahasa Jepang, serta upacara yang berasal dari bala tentara Jepang; 5) Memberi semangat kebasaaan kepada semua murid (Mustafa & Abdullah, 1998:130).

Lebih lanjut, menurut Djumhur & Danasuparta (1975:222), Pemerintahan Orde Lama melakukan pembaharuan pendidikan yang mengarah pendidikan watak atau pendidikan karakter meliputi: a) Pembatasan bahan pelajaran sampai ke pengetahuan yang siap pakai secara efektif; b) Usaha ke arah individualisasi dan keaktifan peserta didik; c) Melepaskan hubungan kelas yang kaku; d) Menugaskan peserta didik untuk lebih banyak bekerja secara kelompok; e) Menghubungkan sekolah dengan masyarakat; f) Mencurahkan perhatian lebih banyak kepada perkembangan perasaan nasionalis, etis, estetis, dan pembentukan watak.

Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara, kendati baru pada penentuan saja karena belum dijelaskan bagaimana meletakkan dasar itu pada tiap-tiap pelajaran (Somarsono Moestoko, 1986: 145). Kurikulum pada masa itu disebut dengan "Rencana Pelajaran 1947" atau lebih populer dengan *leer plan* (bahasa Belanda) yang artinya rencana pelajaran (Gunawan, 1986: 48). Rencana pelajaran 1947 ini pun

bersifat politis, yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya (Sanjaya, 2007:8). Rencana pelajaran lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan intelektual sebagai antitesis dari pendidikan model kolonial.

Apabila kita menilik sejarah bangsa sebenarnya jauh sebelum kemerdekaan para tokoh bangsa telah merintis pendidikan karakter bangsa Indonesia. Ki Hadjar Dewantara telah jauh berpikir dalam masalah pendidikan karakter. Mengasah kecerdasan budi sungguh baik, karena dapat membangun budi pekerti yang baik dan kokoh, hingga dapat mewujudkan kepribadian (*persoonlijkheid*) dan karakter (jiwa yang berbasas hukum) (Dewantara, 1977:24). Menurut Ki Hadjar, "...pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. (Kemdiknas,2010:1)

Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa merintis pendidikan berbasis karakter Indonesia. Bernadib

(1983:37) mencatat Taman siswa yang berdiri 3 Juli 1922 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial yang banyak berorientasi pada kepentingan Belanda. Melalui sistem among, pendidikan Taman Siswa bertujuan membangun anak didik menjadi manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani rohani agar menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan tanah air serta manusia pada umumnya. Taman Siswa selalu menuju pada pertumbuhan anak-anak secara harmonis. Pendidikan kecerdasan, pikiran, kesusilaan, keindahan, dan keluhuran budi pekerti.

Menurut Ahmadi (1987:56), Ki Hajar Dewantara telah dipelopori *platform* pendidikan karakter bangsa Indonesia dengan tiga kalimat: *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani*. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya bagian pertama "Pendidikan" (2004: 28) mengungkapkan ada enam pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa yaitu: memberi contoh (*woorbeeld*); pembiasaan (*pakulinan, gewoontevorming*); pengajaran (*leering, wulang-wuruk*); perintah, paksaan dan hukuman; laku, serta pengalaman lahir batin yang mencakup *ngerti, ngroso, nglakoni* (mengetahui, merasa, dan melakukan).

Sebelum Ki Hajar ada R.A. Kartini (1879-1904) yang dengan gigih memperjuangkan hak-hak kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan dengan merintis pendirian Sekolah Gadis di Jepara dibuka tahun 1903; dan Sekolah Gadis di Rembang (Hasbullah, 2001: 262).

Pada usia 12 tahun dipingit dan tidak melanjutkan sekolah karena adat istiadat, namun tidak memadamkan semangatnya untuk maju. Ia banyak belajar dari membaca buku dan surat menyurat dengan teman dan kenalannya. Meskipun banyak mengalami kekecewaan, Kartini berhasil membuka Sekolah wanita yang pertama di Indonesia. (Mudyahardjo, 2001:285). Mencermati biografi Kartini, Manijo (2013) mengungkapkan Kartini sebagai karakter dengan sosok ideal seorang perempuan pada masanya yang berjiwa kuat, dinamis, mandiri, berwawasan luas dengan intelektualitas tinggi, berpikiran modern, memiliki kepekaan sosial dan jiwa nasionalisme serta rasa religiusitas yang mendalam.

Pemikirannya tentang pendidikan dan pendidikan perempuan cukup progresif pada masanya. Ia berfikir perlunya pendidikan ilmu pengetahuan dan pendidikan budi pekerti dilakukan bersama, karena pendidikan budi pekerti merupakan pendidikan paling awal, ia menjadi tanggung jawab kaum ibu. Dengan sendirinya kaum ibu perlu diberdayakan melalui pendidikan.

Demikian pula pendidikan karakter yang berlangsung di pesantren-pesantren yang telah ada jauh sebelum kedatangan Belanda. Pendidikan di pesantren mengutamakan akhlak mulia. Menurut Dhofier (1985: 21) pendidikan di pesantren bukan semata-mata untuk memperkaya pikiran para santri dengan penjelasan-penjelasan, melainkan untuk meninggikan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral serta menyiapkan para santri untuk hidup sederhana dan bersih hati.

Di antara cita-cita pendidikan yang penting di pesantren adalah melatih para santri berdiri sendiri dan membina diri agar tidak menggantungkan sesuatu kecuali kepada Tuhan. Pada masa penjajahan, pesantren menjadi antitesis dari sistem pendidikan kolonial. Brugman (1987:185) menggambarkan sistem pembelajaran kolonial sebagai berikut.

“Pengajaran pada sistem pendidikan kolonial terlalu intelektualistis, terlalu banyak dijejali dengan bermacam-macam peraturan dan kurang berpijak pada kultur Indonesia. Masa belajarnya terlalu singkat bagi tercapainya hasil belajar yang permanen. Biaya sekolah sangat mahal, dua belas kali lipat jika dibandingkan dengan biaya pendidikan di pesantren.”

Kebijakan pendidikan karakter bangsa tidak lepas dari berbagai

permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan tersebut berpengaruh terhadap model pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa di sekolah. Model pembelajaran pembelajaran nilai-nilai karakter bangsa mengalami perubahan.

Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Bangsa Masa Orde Lama

Manipol Presiden Soekarno setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berdampak pada pendidikan nasional. Dari sisi ideologi, menurut Wardiman Djojonegoro (1996), Manipol diindoktrinasikan pada seluruh lapisan rakyat Indonesia pada semua jenjang Pendidikan, sehingga tidak dibenarkan adanya penafsiran-penafsiran lain selain dari apa yang telah dirinci oleh pemerintah. Dari sisi kebijakan pendidikan, asas pendidikan nasional adalah Pancasila dan Manipol USDEK.

Adapun tujuan pendidikan nasional pada fase ini adalah untuk melahirkan warga-warga sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a). Ketuhanan Yang Maha Esa; (b). Perikemanusiaan yang adil dan beradab; (c). Kebangsaan; (d). Kerakyatan; dan (e). Keadilan sosial seperti dijelaskan dalam Manipol USDEK. (Djojonegoro, 1996:103).

Konsep sosialisme dalam pendidikan pada masa ini memberikan

dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial (Yamin, 2009: 87).

Untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan Manipol, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan menyusun rencana jangka pendek yang kemudian akan disusul dengan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek disusunlah rencana yang disebut Sapta Usaha Tama (Tilaar, 1995:103). Sapta Usaha Tama berisi: a) Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kementerian PP dan K; b) Menggiatkan kesenian dan olah raga; c) Menggiatkan "usaha halaman"; d) Mengharuskan penabungan; e) Mewajibkan usaha-usaha koperasi; f) Mengadakan kelas masyarakat; g) Membentuk regu kerja di kalangan Sekolah Lanjutan Atas dan Universitas.

Sebagai langkah usaha melaksanakan Sapta Usaha Tama tersebut dibentuk suatu urusan khusus yang disebut urusan Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana. Pancawardhana mengusahakan berjalannya sistem pendidikan baru yang meliputi: (1) Perkembangan kecerdasan; (2) Perkembangan moral nasional; (3) Perkembangan artistik emosional; (4) Pengembangan skill; (5) Perkembangan fisik (Said dan Affan, 1987: 78).

Perincian lebih lanjut Pancawardhana bahwa untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan

manipol maka diinstruksikan dan menetapkan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan yang berisi prinsip-prinsip: (a) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional/ internasional/keagamaan; (b) perkembangan kecerdasan; (c) perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin; (d) perkembangan *keprigelan* atau kerajinan tangan; dan (e) perkembangan jasmani. Sejak saat itu seluruh kegiatan sekolah baik yang kurikuler maupun yang ekstrakurikuler banyak berubah dan harus menyesuaikan dengan intruksi di atas. Berdasarkan segi materi pelajaran di sekolah, Pancasila dan Manipol dijadikan mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi (Ahmadi, 1987:9).

Panca Wardhana berimplikasi pada dunia pendidikan. Kurikulum harus diarahkan untuk mengembangkan kualitas yang dinyatakan dalam Panca Wardhana dalam semangat Manipol-USDEK. Tujuan pendidikan berubah dari menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang sosialis dan pelopor dalam membela Manipol-USDEK. Perubahan yang sangat menonjol dalam kurikulum adalah adanya mata pelajaran Civics yang diarahkan untuk pembentukan warganegara yang bercirikan Manipol-USDEK. Liberalisme dan individualisme menjadi musuh dan harus dibersihkan dalam pelajaran Civics karena bertentangan dengan jiwa dan semangat Manipol-USDEK.

Civics menjadi mata pelajaran yang mengemban pendidikan ideologi bangsa dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum (Sjamsuddin, Kosoh, Hamid, 1993:79). Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang berisikan materi pelajaran yang sangat ditentukan oleh ideologi dan politik.

Tujuan dari sistem pendidikan yang berdasarkan prinsip Pancawardhana adalah membentuk manusia sosialis Indonesia berdasarkan cipta, rasa, karsa, dan karyanya pada azas-azas sebagai berikut: (1) kepribadian dan kebudayaan Indonesia; (2) semangat patriot komplit dan paripurna; (3) berasas pancasila; (4) bersemangat gotong royong; (5) memiliki jiwa pelopor (swadaya dan daya cipta); (6) manusia susila dan berbudi luhur; (7) kesadaran bersahaja dan mengutamakan kejujuran;

(8) kesadaran mendahulukan kewajiban daripada hak; (9) kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi; (10) kerelaan berkorban dan hidup hemat; (11) mengenal asas demokrasi terpimpin; (12) mengenal asas ekonomi terpimpin; (13) berdisiplin; (14) memiliki kepandaian untuk menghargai waktu; (15) cara berfikir rasional dan ekonomis; (16) kesadaran bekerja untuk membangun dengan bekerja keras (Assegaf, 2005: 81). Kebijakan pendidikan "Sapta Usaha Tama dan Panca Wardhana" tersebut tertuang dalam

instruksi Menteri PP&K Nomor 1 Tahun 1959.

Model pendidikan karakter bangsa di masa Orde Lama juga dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Dalam Pasal 2 TAP MPRS/II/1960 ditetapkan strategi pembangunan Bidang Mental/Agama/Kerohanian yaitu, Melaksanakan Manifesto Politik di lapangan pembinaan Mental/Agama/Kerohanian dan Kebudayaan dengan menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebudayaan nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing. Strategi selanjutnya adalah menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.

Kebijakan pendidikan karakter bangsa saat itu dilakukan secara sentralistik, sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2003:2) bahwa kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan pada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datangnya dari luar. Bahan-bahan yang diberikan pun bukan hanya tentang Pancasila dan UUD 1945, tetapi juga bahan-bahan yang berisi pandangan politik penguasa masa itu. Materi indoktrinasi dikenal dengan “tujuh

bahan pokok indoktrinasi” atau disingkat tubapi yang terdiri atas Pancasila, Manipol dan USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kebudayaan Indonesia) (Muchson, 2004:34). Sejarah mencatat, bahwa pada periode selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru, apa yang dilakukan oleh rezim Orde Lama itu dipandang sebagai sebuah upaya indoktrinasi.

Pembelajaran Nilai-nilai Karakter

Bangsa Masa Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru membawa jargon pembangunan ekonomi. Pada masa ini, pendidikan nasional diarahkan untuk membekali generasi muda agar mampu membawa bangsa dan negara cepat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang lebih maju (Mastuhu, 2003:33). Pendidikan diatur dengan sistem pendidikan nasional yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan politik bangsa saat itu (Tilaar, 1998:4).

Pada periode ini pendidikan menjadi instrumen pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang, khususnya bidang pedagogi, kurikulum, organisasi, dan evaluasi pendidikan diarahkan pada akselerasi pelaksanaan pembangunan. Kegiatan pendidikan pada era ini banyak diwarnai oleh kebijakan kebijakan sentralistik yang mengarah pada fungsi pendidikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional.

Pembangunan karakter bangsa secara eksplisit dimuat dalam produk politik tertinggi lembaga negara, MPR, berupa GBHN. Pendidikan karakter bangsa pada masa ini diwujudkan dengan TAP MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) disingkat P4.

Untuk melaksanakan dan menindaklanjuti TAP MPR Nomor: II/MPR/1978 diterbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 1978 tentang Penataran Pegawai Republik Indonesia Mengenai Hasil-Hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1978. Langkah selanjutnya adalah menyelenggarakan penataran P-4 bagi masyarakat pada umumnya, serta pegawai negeri di instansi masing-masing. Untuk keperluan ini dibentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7 dengan surat Keputusan Presiden No.10 tahun 1979 (Anggono, 2014:506-507).

Sejak tahun 1983, penataran P4 menjadi hal yang harus diikuti oleh setiap siswa baru di semua sekolah di seluruh wilayah Indonesia (Darmaningtyas, 2004: 11). Pemerintahan Orde Baru menegaskan bahwa P4 adalah petunjuk operasional untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Tujuan dari penataran

P4 adalah terwujudnya secara nyata sikap dan tingkah laku segenap aparatur pemerintah dan warga masyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Madiri Thamrin Sianipar, 1984: 60). Proses indoktrinasi terjadi dalam penerapan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang dilakukan di sekolah-sekolah, sejak dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang berisi tentang butir-butir Pancasila. Penataran P4 menjadi unsur yang sangat penting dan menentukan bagi masa depan siswa pada masa Orde Baru.

Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila pada masa itu berdiri sendiri dalam struktur program kurikulum dalam semua jenjang sekolah. Dalam konsep P-4, Pancasila dirinci menjadi 36 butir yang menjadi standar kemampuan seseorang dalam menguasai Pancasila, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat. Penataran P-4 digalakkan mulai tingkat kelurahan hingga tingkat nasional, termasuk di perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Dalam kurikulum 1994,

Pendidikan Pancasila mengalami perubahan dari mata pelajaran yang berdiri sendiri, Pendidikan Pancasila lalu digabung dalam mata pelajaran PPKn, singkatan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila diintegrasikan sebagai pengetahuan untuk mempertebal semangat dan jiwa kebangsaan melalui ilmu kewarganegaraan.

Niels Mulder (2001:30-31) menggambarkan indoktrinasi pada Mata Pelajaran Moral Pancasila sebagai berikut.

“Tema yang dibicarakan dalam buku pelajaran kelas satu yaitu: “Kerapian”, “Cinta Kasih”, “Kebanggaan”, “Ketertiban”, “Saling Membantu”, “Kerukunan”, “Keberanian”, “Kebersihan” dan “Kesehatan”, “Sikap Hemat”, “Keadilan”, “Kepatuhan”, “Belas Kasih”, “Kesetiaan”, “Bakti” dan “Saling Menghormati”. Tema-tema ini diulang secara terus menerus sampai dengan Sekolah Menengah Atas. Pada tahun-tahun di antara tahun pertama dan tahun kedua belas, pendidikan nilai sedikit demi sedikit menjadi indoktrinasi politik, yang karena diulang-ulang, menjadi tumpang tindih, dan perasaan bosan dan jemu baru terlupakan setelah tes atau ujiannya lulus.”

Sebelum pemberlakuan kurikulum 1984, yaitu pada tahun 1983 mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib. Penetapan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0461/U/1983 yang ditandatangani Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Posisi PSPB sebagai materi dan mata kuliah wajib dalam kurikulum mendapat kedudukan hukum yang lebih kuat ketika MPR mengeluarkan TAP MPR Nomor II/MPR/1983 dimana dinyatakan PSPB sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila.

Dengan demikian maka pendidikan ideologi dilakukan melalui Pendidikan Pancasila yang memiliki komponen

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila (PMP), dan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Digantinya nama pelajaran Civics pada masa Orde Lama menjadi PMP pada masa Orde Baru dalam pandangan Darmaningtyas (2004), memiliki dampak politik yang cukup besar. Mata pelajaran Civics atau Kewarganegaraan mengajarkan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga kewajiban negara terhadap rakyatnya (Darmaningtyas, 2004: 10).

Dengan demikian, setiap peserta didik sudah diajarkan untuk bersikap kritis terhadap negara. PSPB yang berlaku sejak Kurikulum 1984, menurut sebagian pengamat dinilai sebagai upaya hegemoni pendidikan yang lekat dengan nuansa politik karena hanya terfokus pada peranan Angkatan Darat dalam menghadapi PKI pada tahun 1965-1966 Melalui mata pelajaran PSPB diharapkan secara evolutif para lulusan pendidikan formal memiliki apresiasi yang tinggi terhadap ABRI PMP, P4, ataupun PSPB bisa dikatakan merupakan upaya pemerintah Orde Baru untuk membentuk watak bangsa Indonesia.

Pembelajaran Nilai-nilai Karakter

Bangsa Masa Reformasi

Pendidikan karakter bangsa di masa Orde Lama dan Orde Baru tampak diwarnai pola-pola penanaman nilai-nilai yang indoktrinatif. Menurut Tilaar (2009:146) indoktrinasi merupakan salah satu pola

pelaksanaan (praksis) pendidikan berdasarkan kekuasaan. Pembelajaran dalam praksis pendidikan indoktrinasi juga mengikuti pola indoktrinasi. Khususnya pada masa Orde baru pada pertengahan 1980an, para ideolog pemerintah mencoba menggabungkan kumpulan gagasan “indoktrinasi berskala nasional” ke dalam teori negara yang bersifat koheren (David Baurchier, 2007:3).

Indoktrinasi semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Gonzalo de Amézola (2007) meneliti tentang indoktrinasi melalui pembelajaran sejarah di Argentina. Hasilnya adalah semua buku teks sejarah yang terbit antara 1956 sampai 1983 di Argentina selalu memuat konsep tentang tanah air, otoritas, keteraturan, dan tingkatan. Kediktatoran digambarkan sebagai suatu hal yang tak terhindarkan dan wajar dalam pemerintahan Argentina. Fenomena yang sama juga terjadi di Rusia.

Menurut Victor Shnirelman (2009) wacana sejarah dalam buku pelajaran sejarah di Rusia sangat tersentralisasi dan dikuasai oleh negara. Wacana alternatif di luar wacana resmi negara tidak diperkenankan untuk muncul dalam buku teks. Implikasi dari sentralisasi dan penyeragaman wacana ini adalah adanya beberapa kelompok etnis tertentu di Rusia yang termarginalkan dan memori kolektifnya tidak diakui oleh negara.

Indoktrinasi melahirkan keberhasilan semu dalam waktu yang

singkat, sekaligus dipastikan memupuk antipati, kegersangan, kebohongan, ketidakpedulian, kebencian, dan terutama perlawanan terhadapnya. (Surakhmad, 2008:2).

Indoktrinasi dalam dunia pendidikan mematikan kreativitas peserta didik. Ideologi yang seharusnya menjadi pembimbing telah berubah menjadi alat penekan dari penguasa dalam mengendalikan sistem dan isi pendidikan nasional (Tilaar, 2003:67). Pendekatan indoktrinasi seperti itulah yang sempat melumpuhkan Pancasila, hampir sepanjang usianya. Tetapi dari sejarah itu pula kita menemukan sebuah hikmah bahwa ambisi politik penguasa di masa lalu telah menjadi *blessing in disguise*: Ambisi kekuasaan di masa lalu, ternyata bukan saja tidak berhasil mengubah hakikat Pancasila, tetapi juga melahirkan kekuatan penghancuran diri.

Pancasila seakan-akan harus dilahirkan kembali. Pembangunan karakter bangsa Pancasila menjadi arus utama pembangunan nasional pada masa reformasi saat ini. Hal ini tercermin dari misi pembangunan nasional yang memosisikan pendidikan karakter bangsa sebagai misi pertama guna mewujudkan visi pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu

terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks (Pemerintah RI, 2010: 2-3).

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 3 secara tegas mengamanatkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. UUSPN dan RPJPN merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan karakter bangsa.

Di bidang pendidikan kewarganegaraan, dan umumnya dalam kurikulum pendidikan formal di sekolah dasar hingga menengah, reformasi tidak hanya terbatas dalam substansi kajian, metode, dan sistem penilaiannya. Pembaharuan pendidikan kewarganegaraan telah bergeser kepada paradigma

pembentukan warga negara demokratis sebagaimana idealitas universal dari misi pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Berbeda dengan paradigma pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama lebih dari tiga dekade era Orde Baru yang lebih banyak menitikberatkan kepada pembentukan karakter kepatuhan warga negara (siswa) terhadap tafsir resmi pemerintah. Kepatuhan warga negara terhadap tafsir pemerintah dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara yang dilekatkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu.

Di bidang pendidikan karakter bangsa, Kurikulum 2004 yang disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK menghilangkan kata Pancasila dari PPKn, tinggal menjadi PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan, tanpa menyebut Pancasila lagi. Pada tahun ini juga telah dihasilkan konsep *lifskill* (pendidikan kecakapan hidup) yang diimplementasikan dalam pembelajaran sebagai bagian dari upaya membentuk kepribadian yang utuh, memiliki kecakapan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun setelah lulus sekolah.

Belajar dari era sebelumnya yang cenderung indoktrinatif, pendidikan karakter bangsa pada masa reformasi tidak dijadikan satu mata pelajaran khusus. Pendidikan karakter model ini terjadi dengan lebih alamiah ketika dilaksanakan secara natural dan informal. Oleh karena itu, tidak perlu ada mata pelajaran khusus

tentang pendidikan karakter. Demikian juga, tidak perlu ada usaha-usaha terprogram untuk mengembangkan pendidikan karakter yang nantinya malah terjatuh pada formalisme, atau lebih parah lagi jatuh pada indoktrinasi (Doni Koesoema, 2007: 9).

Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Setelah penerapan KTSP 2006 selama kurang lebih lima tahun, pendidikan karakter mengalami penurunan. Dalam Rembug Nasional tahun 2010 dicanangkan target pendidikan karakter tahun 2010 sebesar 10%, tahun 2011 30%, dan tahun 2012 menjadi 100%. Konsep pendidikan karakter ini mencapai puncaknya pada tahun 2011 dan 2012 dengan format silabus dan RPP berbasis karakter. Model silabus dan RPP sudah mulai mengintegrasikan dengan komponen-komponen nilai yang menjadi bagian dari pendidikan karakter, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, serta sejumlah nilai lainnya.

Kurikulum 2013 memberikan kesempatan pada siswa dalam mengembangkan domain sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dituangkan dalam standar Kompetensi Lulusan (SKL) baik tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK yang selanjutnya diuraikan dalam Kompetensi Inti (KI) yang terdiri dari KI

sikap spiritual, KI sikap sosial, KI pengetahuan dan KI keterampilan. Kompetensi inti ini menjadi payung bagi semua mata pelajaran yang diajarkan pada jenjang sekolah tertentu.

Kompetensi Inti selanjutnya dijabarkan di masing-masing mata pelajaran dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD) yang meliputi KD yang berasal dari sikap spiritual, KD yang berasal dari sikap sosial, KD yang berasal dari pengetahuan, dan KD dari keterampilan. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru terhadap siswa harus mencakup KD sikap spiritual, KD sikap sosial, KD pengetahuan dan KD keterampilan sehingga kompetensi yang berkembang dalam pribadi siswa tentu menyeluruh dari semua domain sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Salah satu ciri kurikulum 2013 adalah selalau mengaitkan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam satu konteks pembelajaran. Guru menyampaikan materi dari KD yang berasal dari KI 3 yaitu unsur pengetahuan, selanjutnya dikembangkan KD yang berasal dari KI 4 yaitu unsur keterampilan, barulah dipikirkan sikap (KD yang berasal dari KI 1 dan 2) apa yang akan dikembangkan melalui KD 3 dan KD 4 itu. Dengan demikian satu proses pembelajaran berlangsung siswa akan mengembangkan aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan secara bersama-sama, artinya dengan kurikulum 2013 itu diharapkan akan

terbangun pendidikan karakter secara otomatis karena penanaman nilai-nilai kehidupan (nilai-nilai karakter), termasuk karakter bangsa terintegrasi dalam setiap proses pembelajaran.

Penutup

Pendidikan nilai pada dasarnya proses penanaman perilaku kepada peserta didik yang diharapkan kepada siswa dapat berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggap baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nilai bagi seseorang tidaklah statis, tetapi dapat berubah. Setiap orang akan selalu menganggap sesuatu itu baik sesuai dengan pandangannya pada saat itu. Oleh sebab itu, sistem nilai yang dimiliki seseorang bisa dibina dan diarahkan. Komitmen seseorang terhadap suatu nilai tertentu terjadi melalui pembentukan sikap.

Pendidikan karakter yang dilaksanakan di dunia pendidikan Indonesia semestinya dilaksanakan dalam rangka membentuk dan memperkuat karakter bangsa. Karena itu, pendidikan karakter perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara bertahap supaya tidak menjadi sekadar pengetahuan atau indoktrinasi. Selain itu, pendidikan karakter yang dikembangkan sudah seharusnya berakar dari budaya bangsa Indonesia yang menyepakati Bhineka Tunggal Ika. Pendidikan karakter yang ditanamkan pada anak-anak lewat pendidikan formal meliputi

nilai-nilai yang khas Indonesia dan nilai-nilai universal.

Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi. (1987). *Pendidikan dari masa ke masa*. Bandung: Armico
- Ary H. Gunawan. (1985). *Kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- As'ad Said Ali. (2009). *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bersama*. Jakarta: LP3S.
- Azyumardi Azra. (2003). "Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika", dalam *Tsaqofah*, "Menggagas Pendidikan Multikultural", Vol. I, Nomor 2, Tahun 2003:5.
- _____. (2012). *Pendidikan karakter: peran sekolah dan keluarga*, Makalah Disampaikan pada seminar 'Pendidikan Karakter Teguhkan Pribadi Bangsa' yang terselenggara atas kerja sama PT Penerbit Erlangga dan Himpunan Mahasiswa Biologi, FMIPA, UNNES Semarang, Minggu, 23 September, 2012.
- Brugmans. I. J. (1987). "Politik Pengajaran" dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans (peny.). *Politik etis dan revolusi kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- H.A.R. Tilaar. (2003). *Kekuasaan dan pendidikan: suatu tinjauan dari perspektif studi kultural*. Magelang: Indonesia Tera.
- _____. (2012). *Perubahan sosial dan pendidikan pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hasbullah. (2001). *Sejarah pendidikan islam di indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- I. Djumhur & H. Danasuparta. 1975. *Sejarah pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu.
- Ki Hajar Dewantara. (2004). *Bagian pertama pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Ki Supriyoko. (2015). "Pendidikan Karakter Bangsa sebagai Strategi Kebudayaan", dimuat dalam *Revolusi Mental sebagai Strategi Kebudayaan*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.
- Masnur Muslih. (2011). *Pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensional*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Muh. Said & Juminar Affan. (1987). *Mendidik dari zaman ke zaman*. Bandung: Jemmars.
- Mulder, Niels. (2001). *Individu Masyarakat dan Sejarah-Kajian Kritis Buku-Buku Pelajaran Sekolah di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas. (2009). *Pengembangan dan pendidikan budaya & karakter bangsa: pedoman sekolah*, Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas.
- _____. (2011). *Pedoman pelaksanaan pendidikan karakter: berdasarkan pengalaman di satuan pendidikan rintisan*, Jakarta: Puskur Balitbang Kemdiknas.
- Sartono Kartodirdjo.(2014). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- _____. (2014). *Pemikiran dan perkembangan historiografi indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Sastrapedja, M .(2006). "Pancasila sebagai Orientasi Pembangunan Bangsa dan Pengembangan Etika Ilmu Pengetahuan" *Proseding Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Bangsa*. Tanggal 14-15 Agustus 2006 di Yogyakarta.
- Sjamsuddin, Kosoh Sastradinata, Said Hamid Hasan (1993). *Sejarah pendidikan di indonesia zaman kemerdekaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Somarsono Moestoko. (1986). *Pendidikan Indonesia dari jaman ke jaman*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Sukarno, B. (2005). *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis* (Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sunarjo Wreksosuharjo. (2005). *Ilmu pancasila yuridis kenegaraan dan ilmu filsafat pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. (2014). *Berfilsafat menuju ilmu filsafat pancasila*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Surono. (2014). "Internalisasi nilai-nilai pancasila dalam menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN (MEA 2015)," *Makalah* disampaikan dalam Seminar Wawasan Kebangsaan "Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN" tanggal 1 November 2014 di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

- _____. (2015). *Pancasila, kebhinekaan, dan persaudaraan: sebuah refleksi*, Makalah disampaikan dalam seminar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, “Membangun Wawasan Kebangsaan untuk Meneguhkan Nasionalisme Antisipasi Disintegrasi Bangsa”, tanggal 20 Agustus 2015, Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
- Susanto Zuhdi. (2010). “Identitas Bangsa, Sejarah, dan Pendidikan Sejarah di Indonesia”. dalam Endang Sri Hardiati dan Rr. Triwulan (Peny.). *Pentas ilmu di ranah budaya, sembilan windu prof. dr. edi sedyawati*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sutari Imam Bernadib. (1983). *Sejarah pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wardiman Djojonegoro (1996). *Lima puluh tahun perkembangan pendidikan indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Winarno Surakhmad. (2008). “Pendidikan Pancasila (Pendekatan yang mengIndonesiakan)”. *Pelangi Ilmu Vol 2, No 1, (2008)*.
- Yudi Latief. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. (2014). *Mata air keteladanan, pancasila dalam perbuatan*. Bandung: Mizan